

PERJANJIAN KINERJA

2024



**KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN
KONawe**



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KONAWE**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **WIKE, S.Pd., M.Pd**

Jabatan : Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe

Pada tahun 2024 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Unaaha, 22 Januari 2024

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KONAWE,**



PERJANJIAN KINERJA

SATUAN KERJA : KPU KABUPATEN KONAWE
TAHUN ANGGARAN : 2024

SASARAN STRATEGIS/PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET
2	3	4
Mewujudkan Komisi Pemilihan Umum yang mandiri, professional dan berintegritas	Persentase informasi mengenai partai politik yang mutakhir dan di publikasikan pada publik	17
	Indeks reformasi borokrasi	85
	Nilai akuntabilitas kinerja	B
	Nilai keterbukaan informasi publik	100
Menyelenggarakan pemilu serentak yang demokratis, tepat waktu efisien dan epektif	Persentase partisipasi pemilih dalam pemilu/pemilihan	90
	Persentase partisipasi pemilih perempuan dalam pemilu/pemilihan	90
	Persentase partisipasi pemilih disabilitas dalam pemilu/pemilihan	90
	Persentase pemilih yang berhak memilih tetapi tidak masuk dalam daftar pemilih tetap	0,02
Mewujudkan pemilu serentak yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil	Persentase KPU Konawe yang melaksanakan pemilu/pemilihan yang aman dan damai	100
	Persentase sengketa hukum yang di menangkan KPU Konawe	95

Program

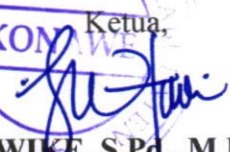
- 1. Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi
- 2. Program Dukungan Manajemen

Jumlah Anggaran

Anggaran

Rp. 35.934.587.000,-
Rp. 2.736.193.000,-

Rp. 38.670.780.000,-

Unaaha, 22 Januari 2024
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KONAWE,
Ketua,

WIKE, S.Pd., M.Pd.



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KONAWE**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **NOORCHAYATY NINGSIH, SE, M.Si**

Jabatan : Sekretaris KPU Kabupaten Konawe

*Selanjutnya disebut **Pihak Pertama***

Nama : **WIKE, S.Pd., M.Pd**

Jabatan : Ketua KPU Kabupaten Konawe

*Selanjutnya disebut **Pihak Kedua***

Pihak Pertama pada tahun 2024 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab Pihak Pertama.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

PIHAK KEDUA
KETUA KPU KAB. KONAWE,

WIKE, S.Pd., M.Pd

PIHAK PERTAMA,
SEKRETARIS KPU KAB. KONAWE,

NOORCHAYATY NINGSIH, SE, M.Si
NIP. 197907042009012002

PERJANJIAN KINERJA

SATUAN KERJA : SEKRETARIAT KPU KABUPATEN KONAWE
TAHUN ANGGARAN : 2024

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1	Pembentukan Evaluasi Badan Penyelenggara Adhok	Persentase badan Adhok yang dibentuk dan dievaluasi	28 kecamatan
2	Tersedianya Pedoman Laporan dan Audit Dana Kampanye, Verifikasi Partai Politik	Jumlah dokumen SOP atau petunjuk teknis untuk pelaporan dana kampanye, verifikasi partai politik	1 Dokumen
3	Terlaksananya Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Hukum	Persentase produk hukum yang dikelola dan didokumentasikan sesuai peraturan perundang-undangan	100 %
		Persentase informasi produk hukum yang disajikan secara cepat, tepat, dan akurat sesuai dengan SOP	100 %
4	Terlaksananya Penyelesaian Sengketa dan Pelayanan Pertimbangan Hukum	Penurunan jumlah sengketa hukum dalam perkara perselisihan sengketa hukum	90 %
		Penurunan jumlah sengketa hukum yang diajukan di Mahkamah Konstitusi	85 %
5	Tersedianya Data dan Informasi Kepegawaian	Persentase pegawai yang tercatat secara akurat dalam Data Base Kepegawaian berbasis teknologi informasi	100 %
6	Terwujudnya Penyelenggaraan Pemilu / Pemilihan Sesuai Jadwal	Persentase KPU Kabupaten/Kota yang menetapkan jadwal tahapan dan petunjuk teknis penyelenggaraan Pemilu / Pemilihan sesuai dengan jadwal	100 %
		Persentase KPU Kabupaten/Kota yang memutakhirkan data wilayah/pemetaan dan penetapan daerah pemilihan untuk Pemilu 2024	100 %
7	Terlaksananya Layanan Administrasi PAW Tepat Waktu dan Sesuai Aturan	Persentase proses PAW anggota DPRD Kabupaten/Kota dapat diselesaikan dalam waktu 5 hari kerja	100 %
8	Pengelolaan Calon Peserta Pemilu	Persentase calon peserta pemilu yang dapat difasilitasi	100 %
9	Tersedianya Pedoman atau Petunjuk Teknis Verifikasi Partai Politik dan/atau Anggota Perorangan	Jumlah dokumen SOP pedoman atau petunjuk teknis Verifikasi Partai Politik dan/atau syarat dukungan calon perseorangan yang disusun sesuai dengan tahapan Pemilu/Pemilihan	100 %
		Persentase data kepengurusan dan keanggotaan partai politik yang dimutakhirkan KPU Kabupaten/Kota	100 %
10	Tersedianya Data, Informasi, Sarana dan Prasarana Teknologi Informasi, serta Penerapan e-	Persentase sarana dan prasarana teknologi informasi untuk system informasi yang aman, handal dan lancar	100 %

	government KPU	Persentase KPU Kabupaten/Kota yang melaksanakan Pemutakhiran Data Pemilih secara Berkelanjutan	100 %
		Persentase Aplikasi KPU yang di terapkan secara terintegrasi	65 %
11	Terwujudnya Reformasi Birokrasi di KPU Kabupaten / Kota	Persentase nilai minimal B untuk penilaian mandiri RB	85 %
12	Meningkatnya Kualitas Layanan Informasi dan Data yang Cepat serta Akurat	Persentase permohonan informasi yang ditindaklanjuti melalui PPID sesuai dengan SOP	100 %
		Persentase informasi dan publikasi tahapan Pemilu/Pemilihan yang dimuat di media massa lokal dan nasional	100 %
		Persentase informasi dan publikasi tahapan Pemilu / Pemilihan yang ditampilkan di Media publikasi paling lambat 1 (satu) kerja	100 %
13	Terwujudnya Data Pemilih secara Berkelanjutan	Persentase pemutakhiran Data Pemilih Tepat Waktu	100 %
14	Terwujudnya Rencana Kerja dan Anggaran Kabupaten/Kota yang Efektif dan Efisien	Persentase laporan monitoring dan evaluasi yang akuntabel dan tepat waktu	90 %
		Persentase Target Kinerja KPU Kabupaten/Kota yang tercapai sesuai dengan perjanjian kinerja	100 %
15	Meningkatnya Akuntabilitas kinerja di Lingkungan KPU Kabupaten / Kota	Persentase ketaatan KPU Kabupaten/Kota dalam pengisian dan penyampaian kartu kendali SPIP secara lengkap dan tepat waktu	90 %
		Nilai akuntabilitas kinerja (SAKIP) KPU Kabupaten/Kota	90 %
16	Tersusunnya Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran	Jumlah laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran berbasis aplikasi yang tepat waktu dan valid	100 %
17	Terlaksanya fasilitasi pengelolaan data kebutuhan, pengadaan, pendistribusian, serta pemeliharaan dan inventarisasi logistik Pemilu/Pemilihan	Persentase KPU Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan tanpa ada permasalahan anggaran dalam pemenuhan kebutuhan logistik	100 %
		Persentase KPU Kabupaten/Kota yang melaksanakan pengadaan logistik keperluan Pemilu/Pemilihan dengan tanpa ada kasus terhadap proses pengadaan yang mengakibatkan kerugian negara atau pemborosan uang negara	100 %
		Persentase KPU Kabupaten/Kota yang mendistribusikan logistik Pemilu/ Pemilihan tepat jenis, jumlah, dan waktu	100 %
		Persentase KPU Kabupaten/Kota yang menginventarisir dan memelihara logistik Pemilu/Pemilihan satu hari sebelum	100 %

		pelaksanaan peungutan suara dalam Pemilu/Pemilihan	
18	Ketersediaan logistik Pemilu	Persentase penyediaan logistik Pemilu	100 %
19	Meningkatnya Kualitas Layanan Persidangan dan Protokol	Persentase Hasil Notulensi/Dokumentasi Rapat Pleno rutin yang diselesaikan paling lambat 2 hari kerja oleh KPU Kabupaten/Kota	90 %
20	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Administrasi Persuratan dan Pengelolaan Arsip	Jumlah rancangan Keputusan KPU Kabupaten/Kota tentang kearsipan yang telah disusun	100 %
		Persentase arsip yang dikelola sesuai jadwal retensi arsip (JRA) oleh KPU Kabupaten/Kota	100 %
21	Terselesaikannya Permasalahan Pengelolaan Keuangan	Persentase permasalahan dalam pengelolaan keuangan yang dapat di selesaikan	85 %
22	Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU	Persentase fasilitas perkantoran untuk mendukung kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik	100 %
		Persentase Gedung dan Gudang KPU Kabupaten Konawe yang berfungsi dengan baik	100 %

Program

Anggaran

1. Penyelenggaraan Pemilu Dalam Proses Konsolidasi Demokrasi

Rp. 35.934.587.000,-
2. Program Dukungan Manajemen

Rp. 2.736.193.000,-

Jumlah Anggaran

Rp. 38.670.780.000,-

Unaaha, 22 Januari 2024
SEKRETARIS KPU KABUPATEN KONAWE,


NOORCHAYATY NINGSIH, SE, M.Si
NIP.197907042009012002

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
SEKRETARIS KPU KABUPATEN KONAWE

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1	Pembentukan Badan Penyelenggara Adhok	Jumlah badan Adhok yang di persiapkan dan di bentuk	28 kecamatan
2	Tersedianya Pedoman Laporan dan Audit Dana Kampanye, Verifikasi Partai Politik	Jumlah dokumen SOP atau petunjuk teknis untuk pelaporan dana kampanye, verifikasi partai politik	1 Dokumen
3	Terlaksananya Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Hukum	Persentase produk hukum yang dikelola dan didokumentasikan sesuai peraturan perundang-undangan	100 %
		Persentase informasi produk hukum yang disajikan secara cepat, tepat, dan akurat sesuai dengan SOP	100 %
4	Terlaksananya Penyelesaian Sengketa dan Pelayanan Pertimbangan Hukum	Penurunan jumlah sengketa hukum dalam perkara perselisihan sengketa hukum	90 %
		Penurunan jumlah sengketa hukum yang diajukan di Mahkamah Konstitusi	85 %
5	Tersedianya Data dan Informasi Kepegawaian	Persentase pegawai yang tercatat secara akurat dalam Data Base Kepegawaian berbasis teknologi informasi	100 %
6	Terwujudnya Penyelenggaraan Pemilu / Pemilihan Sesuai Jadwal	Persentase KPU Kabupaten/Kota yang menetapkan jadwal tahapan dan petunjuk tehnis penyelenggaraan Pemilu / Pemilihan sesuai dengan jadwal	100 %
		Persentase KPU Kabupaten/Kota yang memutakhirkan data wilayah/pemetaan dan penetapan daerah pemilihan untuk Pemilu 2024	100 %
7	Terlaksananya Layanan Administrasi PAW Tepat Waktu dan Sesuai Aturan	Persentase proses PAW anggota DPRD Kabupaten/Kota dapat diselesaikan dalam waktu 5 hari kerja	80 %
8	Pengelolaan Calon Peserta Pemilu	Persentase calon peserta pemilu yang dapat difasilitasi	90 %
9	Tersedianya Pedoman atau Petunjuk Teknis Verifikasi Partai Politik dan/atau Anggota Perorangan	Jumlah dokumen SOP pedoman atau petunjuk tehnis Verifikasi Partai Politik dan/atau syarat dukungan calon perseorangan yang disusun sesuai dengan tahapan Pemilu/Pemilihan	100 %
		Persentase data kepengurusan dan keanggotaan partai politik yang dimutakhirkan KPU Kabupaten/Kota	100 %
10	Tersedianya Data, Informasi, Sarana dan Prasarana Teknologi Informasi, serta Penerapan e-government KPU	Persentase sarana dan prasarana teknologi informasi untuk system informasi yang aman, handal dan lancar	100 %
		Persentase KPU Kabupaten/Kota yang melaksanakan Pemutakhiran Data Pemilih secara Berkelanjutan	100 %
		Persentase Aplikasi KPU yang di terapkan	65 %

		secara terintegrasi	
11	Terwujudnya Reformasi Birokrasi di KPU Kabupaten / Kota	Persentase nilai minimal B untuk penilaian mandiri RB	85 %
12	Meningkatnya Kualitas Layanan Informasi dan Data yang Cepat serta Akurat	Persentase permohonan informasi yang ditindaklanjuti melalui PPID sesuai dengan SOP	100 %
		Persentase informasi dan publikasi tahapan Pemilu/Pemilihan yang dimuat di media massa lokal dan nasional	100 %
		Persentase informasi dan publikasi tahapan Pemilu / Pemilihan yang ditampilkan di Media publikasi paling lambat 1 (satu) kerja	100 %
13	Terwujudnya Data Pemilih secara Berkelanjutan	Persentase pemutakhiran Data Pemilih Tepat Waktu	100 %
14	Terwujudnya Rencana Kerja dan Anggaran Kabupaten/Kota yang Efektif dan Efisien	Persentase laporan monitoring dan evaluasi yang akuntabel dan tepat waktu	90 %
		Persentase Target Kinerja KPU Kabupaten/Kota yang tercapai sesuai dengan perjanjian kinerja	100 %
15	Meningkatnya Akuntabilitas kinerja di Lingkungan KPU Kabupaten / Kota	Persentase ketaatan KPU Kabupaten/Kota dalam pengisian dan penyampaian kartu kendali SPIP secara lengkap dan tepat waktu	85 %
		Nilai akuntabilitas kinerja (SAKIP) KPU Kabupaten/Kota	90 %
16	Tersusunnya Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran	Jumlah laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran berbasis aplikasi yang tepat waktu dan valid	100 %
17	Terlaksananya fasilitasi pengelolaan data kebutuhan, pengadaan, pendistribusian, serta pemeliharaan dan inventarisasi logistik Pemilu/Pemilihan	Persentase KPU Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan tanpa ada permasalahan anggaran dalam pemenuhan kebutuhan logistik	100 %
		Persentase KPU Kabupaten/Kota yang melaksanakan pengadaan logistik keperluan Pemilu/Pemilihan dengan tanpa ada kasus terhadap proses pengadaan yang mengakibatkan kerugian negara atau pemborosan uang negara	100 %
		Persentase KPU Kabupaten/Kota yang mendistribusikan logistik Pemilu/ Pemilihan tepat jenis, jumlah, dan waktu	100 %
		Persentase KPU Kabupaten/Kota yang menginventarisir dan memelihara logistik Pemilu/Pemilihan satu hari sebelum pelaksanaan peungutan suara dalam Pemilu/Pemilihan	100 %
18	Ketersediaan logistik Pemilu	Persentase penyediaan logistik Pemilu	100 %
19	Meningkatnya Kualitas Layanan Persidangan dan Protokol	Persentase Hasil Notulensi/Dokumentasi Rapat Pleno rutin yang diselesaikan paling lambat 2 hari kerja oleh KPU Kabupaten/Kota	90 %

20	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Administrasi Persuratan dan Pengelolaan Arsip	Jumlah rancangan Keputusan KPU Kabupaten/Kota tentang kearsipan yang telah disusun	100 %
		Persentase arsip yang dikelola sesuai jadwal retensi arsip (JRA) oleh KPU Kabupaten/Kota	100 %
21	Terselesaikannya Permasalahan Pengelolaan Keuangan	Persentase permasalahan dalam pengelolaan keuangan yang dapat di selesaikan	85 %
22	Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU	Persentase fasilitas perkantoran untuk mendukung kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik	100 %
		Persentase Gedung dan Gudang KPU Kabupaten Konawe yang berfungsi dengan baik	100 %

Program

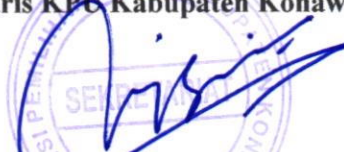
1. Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi
2. Program Dukungan Manajemen

Anggaran

Rp. 25.331.621.000,-
Rp. 2.669.559.000.-

Ketma KPU Kabupaten Konawe,

WIKE, S.Pd., M.Pd

Unaaha, 22 Januari 2024
Sekretaris KPU Kabupaten Konawe,

NOORCHAYATY NINGSIH, SE, M.Si
NIP.197907042009012002



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

N a m a : **DIAN SRIPITA, SPi**

Jabatan : Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik KPU Kab. Konawe

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

N a m a : **NOORCHAYATY NINGSIH, SE, M.Si**

Jabatan : Sekretaris Komisi Pemilihan Umum

Selaku atasan langsung **Pihak Pertama**

Selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

**PIHAK KEDUA
SEKRETARIS KPU,**

NOORCHAYATY NINGSIH, SE, M.Si

Unaaha, 22 Januari 2024

**PIHAK PERTAMA
Kasubbag Keuangan, Umum dan
Logistik,**

DIAN SRIPITA, SPi

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik
Sekretariat KPU Kabupaten Konawe

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1	Tersusunnya Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran	Jumlah laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran berbasis aplikasi yang tepat waktu dan valid	100 %
2	Terlaksananya fasilitasi pengelolaan data kebutuhan, pengadaan, pendistribusian, serta pemeliharaan dan inventarisasi logistik Pemilu/Pemilihan	Persentase KPU Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan tanpa ada permasalahan anggaran dalam pemenuhan kebutuhan logistik	100 %
		Persentase KPU Kabupaten/Kota yang melaksanakan pengadaan logistik keperluan Pemilu/Pemilihan dengan tanpa ada kasus terhadap proses pengadaan yang mengakibatkan kerugian negara atau pemborosan uang negara	100 %
		Persentase KPU Kabupaten/Kota yang mendistribusikan logistik Pemilu/Pemilihan tepat jenis, jumlah, dan waktu	100 %
3	Ketersediaan logistik Pemilu	Persentase penyediaan logistik Pemilu Secara Tepat Jenis, Tepat Jumlah, Tepat Mutu, dan Tepat Waktu	100 %
4	Meningkatnya Kualitas Layanan Persidangan dan Protokol	Persentase Hasil Notulensi/Dokumentasi Rapat Pleno rutin yang diselesaikan paling lambat 2 hari kerja oleh KPU Kabupaten/Kota	90 %
5	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Administrasi Persuratan dan Pengelolaan Arsip	Jumlah rancangan Keputusan KPU Kabupaten/Kota tentang kearsipan yang telah disusun	100 %
		Persentase arsip yang dikelola sesuai jadwal retensi arsip (JRA) oleh KPU Kabupaten/Kota	100 %
6	Terselesaikannya permasalahan pengelolaan keuangan	Persentase permasalahan dalam pengelolaan keuangan yang dapat di selesaikan	85 %
7	Terwujudnya dukungan sarana dan prasarana guna meningkatkan kelancaran tugas KPU	Persentase fasilitas perkantoran untuk mendukung kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik	100 %
		Persentase Gedung dan Gudang KPU Kabupaten Konawe yang berfungsi dengan baik	100 %

Kegiatan :

Anggaran

- | | | |
|--|-----|-----------------|
| 1. Pengelolaan, Pengadaan, Laporan, dan Dokumentasi Logistik | Rp. | 1.835.951.000,- |
| 2. Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara | Rp. | 2.438.511.000,- |
| 3. Operasional Perkantoran dan Dukungan Sarana dan Prasarana | Rp. | 297.682.000,- |



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

N a m a : **MUHAMMAD RUSLAN, S.H., M.IP**

Jabatan : Kasubbag Perencanaan Data dan Informasi Kab.Konawe

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

N a m a : **NOORCHAYATY NINGSIH, SE., MSI**

Jabatan : Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kab. Konawe

Selaku atasan langsung **Pihak Pertama**

Selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

**PIHAK KEDUA
SEKRETARIS KPU,**

NOORCHAYATY NINGSIH, SE., MSI

Unaaha, 22 Januari 2024

**PIHAK PERTAMA
Kasubbag Perencanaan Data dan
Informasi,**

MUHAMMAD RUSLAN, S.H., M.IP

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
Kasubbag Perencanaan Data dan Informasi
Sekretariat KPU Kabupaten Konawe

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1	Tersedianya data, informasi, sarana dan prasarana teknologi informasi, serta penerapan e-government KPU	Persentase sarana dan prasarana teknologi informasi untuk sistem informasi yang aman, handal dan lancar	100 %
		Persentase Aplikasi KPU yang di terapkan secara terintegrasi	90 %
2	Terwujudnya Reformasi Birokrasi di KPU Kabupaten / Kota	Persentase nilai minimal B untuk penilaian mandiri RB	85 %
3	Meningkatnya Kualitas Layanan Informasi dan Data yang Cepat serta Akurat	Persentase permohonan informasi yang ditindaklanjuti melalui PPID sesuai dengan SOP	100 %
		Persentase informasi dan publikasi tahapan Pemilu/Pemilihan yang dimuat di media massa lokal dan nasional	100 %
		Persentase informasi dan publikasi tahapan Pemilu / Pemilihan yang ditampilkan di Media publikasi paling lambat 1 (satu) kerja	100 %
4	Terwujudnya Data Pemilih secara Berkelanjutan	Persentase pemutakhiran Data Pemilih Tepat Waktu	100 %
5	Terwujudnya Rencana Kerja dan Anggaran Kabupaten/Kota yang Efektif dan Efisien	Persentase laporan monitoring dan evaluasi yang akuntabel dan tepat waktu	90 %
		Persentase Target Kinerja KPU Kabupaten/Kota yang tercapai sesuai dengan perjanjian kinerja	100 %
6	Meningkatnya Akuntabilitas kinerja di Lingkungan KPU Kabupaten / Kota	Persentase ketaatan KPU Kabupaten/Kota dalam pengisian dan penyampaian kartu kendali SPIP secara lengkap dan tepat waktu	85 %
		Nilai akuntabilitas kinerja (SAKIP) KPU Kabupaten/Kota	90 %

Kegiatan :

1. Perencanaan dan Penganggaran Pemilu
2. Pengelolaan Sarana IT KPU
3. Data dan Informasi

Anggaran

Rp. 493.885.000,-
Rp. 68.111.000,-
Rp. 7.700.000,-



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

N a m a : **ERNI SETIYAWATI, SE**

Jabatan : Kasubbag Hukum dan SDM Kab. Konawe

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

N a m a : **NOORCHAYATY NINGSIH, SE., MSI**

Jabatan : Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kab. Konawe

Selaku atasan langsung Pihak Pertama

Selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Unaaha, 22 Januari 2024

PIHAK PERTAMA
Kasubbag Hukum dan SDM,

PIHAK KEDUA
SEKRETARIS KPU,



NOORCHAYATY NINGSIH, SE., MSI



ERNI SETIYAWATI, SE

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
Kasubbag Hukum dan SDM
Sekretariat KPU Kabupaten Konawe

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1	Pembentukan Seleksi Badan Penyelenggara Adhok	Jumlah badan Adhok yang di persiapkan dan di bentuk	28 kecamatan
2	Terlaksananya pengelolaan dan pelayanan informasi hukum	Persentase produk hukum yang dikeloladan didokumentasikan sesuai peraturan perundang-undangan	100 %
		Persentase informasi produk hukum yang disajikan secara cepat, tepat, dan akurat sesuai dengan SOP	100 %
3	Tersedianya Pedoman Laporan dan Audit Dana Kampanye, Verifikasi Partai Politik	Jumlah dokumen SOP atau petunjuk teknis untuk pelaporan dana kampanye, verifikasi partai politik	1 Dokumen
4	Terlaksananya Penyelesaian Sengketa dan Pelayanan Pertimbangan Hukum	Penurunan jumlah sengketa hukum dalam perkara perselisihan sengketa hukum	90 %
		Penurunan jumlah sengketa hukum yang diajukan di Mahkamah Konstitusi	85 %
5	Tersedianya Data dan Informasi Kepegawaian	Persentase pegawai yang tercatat secara akurat dalam Data Base Kepegawaian berbasis teknologi informasi	100 %

Kegiatan :

1. Pembentukan Badan Adhoc
2. Penyelenggaraan Pelatihan Teknis Kepemiluan
3. Penyelesaian Sengketa Penetapan Hasil Pemilu

Anggaran

Rp. 29.159.040.000,-
 Rp. 97.706.000,-
 Rp. 1.000.000,-



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

N a m a : **JASWAL, SH**

Jabatan : Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi Hubungan Masyarakat Kab. Konawe

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

N a m a : **NOORCHAYATY NINGSIH, SE., MSi**

Jabatan : Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kab. Konawe

Selaku atasan langsung Pihak Pertama

Selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

**PIHAK KEDUA
SEKRETARIS KPU,**

NOORCHAYATY NINGSIH, SE., MSi

Unaaha, 22 Januari 2024

**PIHAK PERTAMA
Kasubbag Teknis Penyelenggaraan
Pemilu, Partisipasi Hubungan
Masyarakat,**

JASWAL, SH

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi
Hubungan Masyarakat
Sekretariat KPU Kabupaten Konawe

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1	Tersedianya pedoman laporan dan audit dana kampanye, verifikasi partai politik	Jumlah dokumen SOP atau petunjuk teknis untuk pelaporan dana kampanye, verifikasi partai politik	1 Dokumen
2	Terwujudnya Penyelenggaraan Pemilu / Pemilihan Sesuai Jadwal	Persentase KPU Kabupaten/Kota yang menetapkan jadwal tahapan dan petunjuk teknis penyelenggaraan Pemilu / Pemilihan sesuai dengan jadwal	100 %
		Persentase KPU Kabupaten/Kota yang memutakhirkan data wilayah/pemetaan dan penetapan daerah pemilihan untuk Pemilu 2024	100 %
3	Terlaksananya Layanan Administrasi PAW Tepat Waktu dan Sesuai Aturan	Persentase proses PAW anggota DPRD Kabupaten/Kota dapat diselesaikan dalam waktu 5 hari kerja	80 %
4	Pengelolaan Calon Peserta Pemilu	Persentase calon peserta pemilu yang dapat difasilitasi	90 %

Kegiatan :

1. Sosialisasi/Penyuluhan/Bimbingan Teknis Tahapan Pelaksanaan
2. Pengucapan Sumpah Janji Presiden dan Wakil Presiden serta
3. Masa Kampanye Pemilu
4. Pemungutan dan Penghitungan Suara
5. Penetapan Hasil Pemilu

Anggaran

- | | |
|-----|-----------------|
| Rp. | 200.300.000,- |
| Rp. | 18.710.000,- |
| Rp. | 1.264.529.000,- |
| Rp. | 2.767.541.000,- |
| Rp. | 28.814.000,- |